



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan merupakan sesuatu yang diurus bersama antar tingkatan pemerintahan berdasarkan asas efektifitas, efisiensi dan eksternalitas ;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan legalitas urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Sintang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Gbersih Dan bebasDari krupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara republik Indonesia ahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2000 Nomor Nomor 20 Seri D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
Dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang beserta Perangkat Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintahan Kabupaten Sintang untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Sintang yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri atas 26 (dua puluh enam) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. lingkungan hidup ;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olahraga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan dan ketransmigrasi;
 - m. pertanian dan ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. perhubungan;
 - p. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - q. komunikasi dan informatika;
 - r. pertanahan;
 - s. pertanahan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
 - u. pemberdayaan masyarakat dan desa:
 - v. sosial;
 - w. kebudayaan;
 - x. statistik;
 - y. kearsipan; dan
 - z. perpustakaan.
- (3) Urusap pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Sintang.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, meliputi 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan yang meliputi :
- a. kehutanan;
 - b. sumber energi dan sumber daya mineral;
 - c. perairan sungai, danau dan perikanan;
 - d. perdagangan; dan
 - e. industri;
- (5) Rincian bidang urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XXXI Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan ini, menjadi dasar dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pasal 5

Urusan pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang dapat :
- a. menyelenggarakan sendiri;
 - b. menyerahkan urusan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan Desa;
 - c. menugaskan dan / atau melimpahkan tugas pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan atas tugas pembantuan.
- (2) Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini, diprioritaskan urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan lebih berhasilguna dan berdayaguna apabila penyelenggarannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa.
- (3) Penugasan dan/atau pelimpahan tugas pemerintahan kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, diprioritaskan pada tugas pemerintahan yang berdampak lokal dan lebih berhasilguna dan berdayaguna apabila dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan urusan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan tugas pemerintahan daerah kepada Pemerintahan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 JULI 2008

BUPATI SINTANG,

TTD

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Agustus 2008

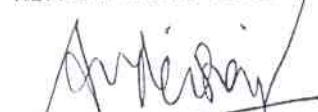
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

TTD

ABDUSSAMAD ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2008 NOMOR 1

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


GA. ANDERSON, SH, MM
PEMBINA
NIP. 520013292

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 1 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Ayat (1) Cukup Jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PENDIDIKAN**

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		
1	2	3	4
1. Kebijakan	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat kabupaten. 4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal. 5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggaraan pendidikan nonformal. 6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal. 8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah. 9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional. 11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat kabupaten. 	
	2. Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya. 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya. 	
	3. Kurikulum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar. 	

a. Sarana dan Prasarana

	<p>1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Pengawasan pelayanan bantuan sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p>	
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan	<p>1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya.</p> <p>3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten.</p> <p>4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.</p>	
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	<p>1. Penilaian Hasil Belajar</p> <p>2. Evaluasi</p> <p>3. Akreditasi</p> <p>4. Penjaminan Mutu</p>	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala kabupaten.</p> <p>Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.</p> <p>1. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan.</p> <p>2. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional.</p> <p>3. Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu.</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH	
1	2	3		4	5
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1.	Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten.		
		2.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kabupaten.		
		3.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kabupaten.		
		4.	Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.		
	2. Lingkungan Sehat	1.	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.		
		2.	Penyehatan lingkungan.		
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1.	Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kabupaten.		
		2.	Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten.		
		3.	Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.		
4. Pelayanan Masyarakat	Kesehatan Petorangan dan	1.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan heji skala kabupaten.		
		2.	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten.		
		3.	Penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten.		
		4.	Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.		
		5.	Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.		
		6.	Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang sejara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana pemungjang yang setara.		

1	2	3
2. Pembiayaan Kesehatan	1. Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal. 2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis. 2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten. 3. Pelatihan teknis skala kabupaten. 4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundangan. 5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	1. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat serta Perbekalan Kesehatan	1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten/kota 2. Pengambilan sampling/contoh sediaan farmasi di lapangan. 3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi. 4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga. 5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I. 6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PEAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). 7. Pemberian izin apotik, toko obat.
5. Pemberdayaan Masyarakat	1. Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan 2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan. 1. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten. 2. Pengelolaan surkesda skala kabupaten. 3. Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.

1	2	3
3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.	
4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.	
5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala kabupaten.	

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	1	2
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten. 2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 6. Pembentukan komisi irigasi kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah. 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keterlibatan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 4. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengujian, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten. 5. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten. 6. Pemberdayaan kelarangan sumber daya air tingkat kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. 3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten. 4. Penyelegaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten. 5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten. 6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 Ha. 7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten. 	
	3.Pembangunan/ Pengelolaan		
	4. Pengawasan dan Pengendalian		

	<p>1. Pengaturan</p> <ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Penetapan status jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. <p>2. Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota. <p>3. Pembangunan Pengusahaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jalan kota. <p>4. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan jalan kota. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa dan jalan kota.
2. Bina Marga	<p>1. Pengaturan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. <p>2. Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan PS perkotaan dan pedesaan tingkat kabupaten. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. <p>3. Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPjP dan RPJM nasional dan provinsi. Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
3. Perkotaan dan Perdesaan	<p>1. Pengaturan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengaturan Pembinaan Pembangunan <p>2. Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten (mengacu kebijakan nasional dan provinsi). Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan NSPK. <p>3. Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah kabupaten dengan mengacu pada RPjP dan RPJM nasional dan provinsi. Penyelenggaraan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha / masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan kabupaten. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan di wilayah kabupaten. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.

4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.		
	4. Pengawasan	4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di kabupaten.
4. Air Minum	1. Pengaturan 2. Pembinaan 3. Pembangunan 4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kabupaten. 2. Penetapan BUMD sebagai penyelenggara SPAM di kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan SPAM yang disusun pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya. <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam wilayah kabupaten. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah kabupaten termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD. 3. Penetapan pemanfaatan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah kabupaten. 4. Pengembangan SPAM di wilayah kabupaten untuk pemanfaatan SPAM. 5. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknisi) kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. 6. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kabupaten. 7. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air di kabupaten. 8. Penanganan bencana dalam tingkat kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten.

	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kabupaten. 2. Pekerjaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah. <p>3. Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten dalam rangka memenuhi SPM. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten. 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten). <p>4. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten. 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
	6. Persampahan	<p>1. Pengaturan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan di kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan lembaga tingkat kabupaten penyelenggara pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten. 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang dietapkan oleh pemerintah dan provinsi. 4. Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kabupaten. <p>2. Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kabupaten. 2. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di kabupaten. <p>3. Pembangunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kabupaten. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan kabupaten. <p>4. Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase dan pematuhan genangan di wilayah kabupaten berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. <p>Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuhan genangan di wilayah kabupaten.</p>
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten serta koordinasi dengan daerah sekitarnya. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah kabupaten. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala kabupaten.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di wilayah kabupaten. 2. Penyelenggaraan pembangunan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di wilayah kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah kabupaten. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
	8. Permuksiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Siap Bangun (Kesiaga) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kesiaga/Lisiba di wilayah kabupaten. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kesiaga dan Lisiba di wilayah kabupaten. <p>Penyelenggaraan pembangunan Kesiaga/Lisiba di kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kesiaga/Lisiba. 2. Penetapan izin lokasi Kesiaga/Lisiba di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kesiaga dan Lisiba di kabupaten. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan Kesiaga dan Lisiba di kabupaten. 2. Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kesiaga dan Lisiba di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.

	a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/melayan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 1. Penyelenggaran penanganan kawasan kumuh perkotaan di kabupaten. 2. Pengelolaan peremajaan/pembangunan permukiman kumuh/melayan dengan rusunawa. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
	3. Pembangunan Kawasan : a. Pengaturan b. Pembangunan c. Pengawasan	1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 1. Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional. 1. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah kabupaten. 2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kabupaten. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kabupaten.
9. Bangunan Gedung dan Lingkungan	1. Pengaturan 2. Pembinaan	1. Penetapan peraturan daerah kabupaten, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional. 2. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten mengenai bangunan gedung dan lingkungan. 3. Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kabupaten. 4. Penyelenggaraan IMB gedung. 5. Pendataan bangunan gedung. 6. Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darsat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana. 7. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 1. Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

		<p>3. Pembangunan</p> <p>4. Pengawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. 2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten. 3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 2. Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemakaian, dan pembongkaran bangunan gedung. 3. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.
10. Jasa Konstruksi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan 2. Pemberdayaan 3. Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditegakkan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan 5. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kabupaten. 6. Penetiran perizinan usaha jasa konstruksi. 1. Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kabupaten. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3
1. Pengendalian Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<p>1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten.</p> <p>2. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kabupaten.</p> <p>5. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kabupaten.</p> <p>6. Izin lokasi pengolahan limbah B3.</p> <p>7. Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.</p>
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<p>1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kabupaten, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.</p> <p>2. Pemberian rekomendasi UKL dan UPL.</p> <p>3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kabupaten.</p>
	3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	<p>1. Pengelolaan kualitas air skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten.</p> <p>4. Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten.</p> <p>5. Pengawasan terhadap penerapan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>6. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.</p> <p>7. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten.</p> <p>8. Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.</p> <p>9. Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.</p>

1	4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. 5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut	2 3	<p>4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara.</p> <p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p> <p>-</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kabupaten. Pengawasan terhadap pemaataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kabupaten. Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan. <p>6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/atau Lahan</p> <p>7. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa</p> <p>8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana</p> <p>9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup</p>
			<p>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan lokasi untuk pengelolaan konservasi sungai dan danau.</p> <p>4. Pengawasan pemaataan instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan skala kabupaten.</p> <p>5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan pelaksanaan terhadap monitoring kualitas lingkungan pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>7. Penegakan hukum terhadap peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir laut yang dikeluarkan oleh daerah kabupaten atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.</p>	<p>Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kabupaten yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.</p> <p>Penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.</p> <p>Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kriteria kabupaten baku kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional.</p> <p>Penetapan kondisi lahan dan/atau tanah.</p> <p>Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kabupaten.</p> <p>Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kabupaten.</p> <p>Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kabupaten.</p> <p>Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kabupaten.</p>
			<p>1. Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>3. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>4. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>5. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>7. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>8. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>9. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p>	<p>1. Pengaturan terhadap pencegahan pencemaran dan perusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>3. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>4. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>5. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>7. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>8. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>9. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p>
			<p>1. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>3. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>4. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>5. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>7. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>8. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>9. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p>	<p>1. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>2. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>3. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>4. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>5. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>7. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>8. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p> <p>9. Pengaturan terhadap pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan wilayah pesisir sungai dan danau skala kabupaten.</p>

1	2	3
10. Pengembangan Lingkungan	Perangkat Ekonomi	<p>1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kabupaten.</p> <p>2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan.</p> <p>3. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.</p>
11. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		<p>1. Evaluasi hasil pelaksanaan diklat di kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kabupaten.</p>
12. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup.		Penyelegaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala kabupaten.
13. Penegakan Hukum Lingkungan		Penegakan hukum lingkungan skala kabupaten.
14. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan		<p>1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kabupaten.</p> <p>2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kabupaten.</p>
15. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfer		<p>1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan dampak deposisi asam skala kabupaten.</p>
16. Laboratorium Lingkungan		Penyediaan laboratorium lingkungan sesuai dengan kebutuhan daerah
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	1. Keanekaragaman Hayati	<p>1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemantauan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerlolan keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p> <p>6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

NOMOR : 1 TAHUN : 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PENATAAN RUANG

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
1	2	3
1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kabupaten. Penetapan penataan ruang perairan sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang. Penetapan kawasan strategis kabupaten. 	
2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang. Sosialisasi SPM bidang penataan ruang. Pendidikan dan pelatihan. Penelitian dan pengembangan. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 	
3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK). Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. Penetapan rencana detail lata ruang untuk RTRWK. Penyusunan program dan anggaran kabupaten di bidang penataan ruang. Pemanfaatan kawasan strategis kabupaten. Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kabupaten dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten. Perumusan program sektor di dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. 	

1	2	3
		12. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten. 13. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. 14. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten. 15. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten. 16. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK. 17. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK. 18. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten.
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3	
1. Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	1. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; pada skala kabupaten. 2. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. 3. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa. 4. Pelaksanaan SPM kabupaten. 5. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri. 6. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten. 7. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 8. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan lingkungan perkotaan skala kabupaten. j. Penetapan keseimbangan pengembangan perkotaan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten. 10. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten. 11. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kawasan perdesaan skala kabupaten. 12. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten. 13. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten. 14. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahahan skala kabupaten. 15. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahahan skala kabupaten. 16. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten. 17. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.	

1	2.	3.
	2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>3. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>5. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>6. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa.</p> <p>7. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten.</p>
	3. Monitoring dan Evaluasi (Money)	<p>1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/desa.</p> <p>3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten.</p> <p>6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah teringgal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten.</p> <p>7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritias, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terehadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : I TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERUMAHAN

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	3
1	2	
1. Pembelaan	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyusuan pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembangunan dan pemilihan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
	2. Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program kabupaten di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan NSPM kabupaten bidang pembiayaan perumahan. 3. Pelaksanaan, penerapan dan penyusuan pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan. 4. Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kabupaten. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kabupaten. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pemindangan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan perumahan di tingkat kabupaten. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kabupaten.
2. Pembinaan Perumahan Formal	1. Pembangunan Baru	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perumahan. 2. Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perumahan dengan undangan di kabupaten dengan peraturan perumahan. 3. Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kabupaten.

1		<p>4. Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan.</p> <p>6. Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan.</p> <p>7. Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <p>8. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan PSU skala kabupaten.</p> <p>9. Melaksanakan hasil sosialisasi.</p> <p>10. Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan.</p> <p>11. Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan.</p> <p>12. Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kabupaten.</p> <p>13. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal.</p> <p>14. Perumusan RPJIP dan RPJM kabupaten/kota.</p> <p>15. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kabupaten.</p> <p>16. Pembangunan Rusunawa dan Rusunami lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperlukan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan / produksi.</p> <p>17. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun dan Rusus dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan.</p> <p>18. Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten, penyediaan tanah, PSU umum.</p> <p>19. Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendiftribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.</p>
2		<p>2. Perbaikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan SPO baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kabupaten. 3. Pelaksanaan SPM perumahan dan PSU pesir dan pantai di kabupaten. 4. Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan. 5. Penetapan harga sewa rumah. 6. Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-kabupaten.

1	2	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan. Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, perbatasan internasional. Pengembangan PSU bantuan pusat. Pembentukan kelembagaan perumahan kabupaten. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan. Penyusunan pedoman dan manual penghuni dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rusun dan rusus.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru		<ol style="list-style-type: none"> Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan strategi kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJPD dan RPJM kabupaten tentang perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Penyusunan RPJPD dan RPJM kabupaten perumahan swadaya. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kabupaten. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

1	2	3. Perbaikan	
		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten/kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJIP dan RPJM kabupaten/kota perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	
		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPJIP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>	

1	2	3
5. Pemeliharaan		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPjP dan RSPJN kebijakan perumahan swadaya.</p> <p>3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>7. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>8. Peningkatan kapasitas pelaku pendukung pembangunan perumahan perumahan swadaya.</p>
6. Pemanfaatan		<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>2. Penyusunan RPjP dan RPJM kabupaten perumahan swadaya.</p> <p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kabupaten tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kabupaten.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah kabupaten yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam pengembangan kawasan.</p> <p>2. Penyusunan Rencana Kabupaten dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Perumukiman Daerah (RP4D-Kabupaten).</p> <p>3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.</p> <p>4. Penyusunan RP4D di wilayahnya.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kabupaten.</p> <p>6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.</p>

<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
		<p>2. Kawasan Skala Besar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya.
		<p>3. Kawasan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
		<p>4. Keterpaduan Prasarana Kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
		<p>5. Keserasian Kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 3. Pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang- undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>2.</p>	<p>3</p>
			<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam berlakunya perumahan. 3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 4. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 7. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 8. Pelaksanaan kebijakan kabupaten untuk pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian ekstermasitas pembangunan perumahan di kabupaten. <p>2. Permuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam berlakunya perumahan. 3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 4. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat Kabupaten. 7. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kabupaten. 8. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 10. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Fasilitasi penyelesaian ekstermasitas pembangunan perumahan di kabupaten. 13. Fasilitasi penyelesaian ekstermasitas pembangunan perumahan di kabupaten.

1	2	3. Perbaikan
		<p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>4. Perluasan</p> <p>1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kabupaten.</p>

1	2	3
5. Pemeliharaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksteritas pembangunan perumahan di kabupaten.
6. Pemanfaatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kabupaten. 2. Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kabupaten dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan. 3. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kabupaten. 4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten. 5. Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 6. Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kabupaten. 7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kabupaten. 8. Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kabupaten. 9. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kabupaten. 10. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 12. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan. 13. Fasilitasi penyelesaian eksteritas pembangunan perumahan di kabupaten.

1	6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	2	3
		<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>		
		<p>2. Pemugaran</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>		
		<p>3. Perbaikan</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>		
		<p>4. Pemeliharaan</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>		

1	5. Pemanfaatan	3.	Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.	<p>1. PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
2	7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Perusahaan Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru		<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan perumahan.</p>

1	4. Perluasan	3
		<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan kabupaten tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.</p> <p>5. Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.</p> <p>6. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH			
SUB BIDANG	SUB BIDANG	SUB BIDANG	SUB BIDANG
1	2	3	4
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan		
		Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :	
		a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.	
		b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.	
		c. Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral.	
		d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	
		e. Kemitraan dan kewirausahaan.	
		f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).	
		g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.	
		h. Pengaturan sistem penganggaran prestasi.	
		i. Peningkatan prasartana dan sarana.	
		j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.	
		k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.	
		l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.	
		m. Pencegahan dan perlindungan bahaya distrikif.	
	2. Pelaksanaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten :	
		a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional.	
		b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten.	
		c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.	
		d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten.	
		e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.	
	3. Koordinasi	Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten :	
		a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.	
		b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	
		c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten.	

1	2	3
4.	<p>Pembinaan dan Pengawasan</p> <p>4. Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, pengembangan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	<p>1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan</p>	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyeleenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyeleenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan partisipasi secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga. p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria iembaug keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasarkan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

1	2.	Pelaksanaan	3
			Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten :
			<ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3.	Koordinasi	Koordinasi bidang keolahragaan skala Kabupaten :
			<ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/stansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara kabupaten/kota dan kecamatan.
	4.	Pembinaan dan Pengawasan	Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten :
			<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan. c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Perihindan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 3
1. Kebijakan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<p>1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.</p> <p>3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kabupaten di bidang penanaman modal meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu diperimbangkan tertutup. b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu diperimbangkan terbuka dengan persyaratan. c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu diperimbangkan mendapat prioritas tinggi di kabupaten. d. Penyusunan peta investasi daerah kabupaten/kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kabupaten/kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar. e. Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten. <p>4. Menetapkan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
2. Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Kebijakan Penanaman Modal	<p>1. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>2. Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>3. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kabupaten.</p> <p>4. Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.</p>

1	2.	3.	4.	5.	6.	
2. Promosi Modal	2. Penanaman	Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kabupaten. 3. Pelayanan Modal	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah. 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendekatan atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.	1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di kabupaten. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.	1. Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah provinsi. 3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kabupaten. 4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah. 5. Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal.	1. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kabupaten kepada aparat pemerintah dan dunia usaha. 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kabupaten.
1	2	3	4	5	6	

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
1	2	3
1. Kelembagaan Koperasi		
		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kabupaten. (Tugas Pembantuan)</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kabupaten.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kabupaten (Tugas Pembantuan).</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi Pengembangan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah, Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembenturan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota, Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten/kota. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kabupaten. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya.</p> <p>2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemersyarikatan koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kabupaten.</p> <p>4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kabupaten.</p>

1	2	3
3. Pemberdayaan UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana. Persaingan, Prasarana, Informasi, Kemitraan, Penjaminan, Perlindungan.. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi Produksi, Pemasaran, Sumber daya manusia, Teknologi. 3. Fasilitasi akses perjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kabupaten meliputi Kredit perbankan, Penjaminan lembaga bukan bank, Modal ventura, Pinjaman dari dana pengastikan sebagai laba BUMN, Hibah, Jenis pembiayaan lain. 	
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi	Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Kopertasi dan UKM dalam wilayah kabupaten.	

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		
1	2	3	
1. Pendataan Penduduk	1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan	Penetapan kebijakan pendataan penduduk skala kabupaten. Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 1. Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan perlayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK); b. Pendaftaran perubahan alamat; c. Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; d. Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara; e. Pendaftaran pindah datang Antarnegara; f. Pendaftaran penduduk yang tinggal di perbatasan Antarnegara; g. Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan; h. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk; i. Penatausahaan pendaftaran penduduk. 4. Pemantauan dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Pengawasan.	1. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten. 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kabupaten. 1. Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kabupaten.

1	2	3
<p>2. Pencatatan Sipil</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 2. Sosialisasi 3. Penyelenggaraan 	<p>Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kabupaten meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Pencatatan kelahiran; b. Pencatatan lahir mati; c. Pencatatan perkawinan; d. Pencatatan perceraian; e. Pencatatan kematian; f. Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; g. Pencatatan perubahan nama; h. Pencatatan perubahan status kewarganegaraan; i. Pencatatan peristiwa penting lainnya; j. Pencatatan perubahan dan pembatalan akta; k. Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil; l. Penatausahaan dokumen pencatatan sipil. <p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>6. Pengawasan</p>	<p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kabupaten.</p>

1	2	3
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	<p>1. Kebijakan</p> <p>2. Sosialisasi</p> <p>3. Penyelenggaraan</p>	<p>Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kabupaten.</p> <p>3. Pemediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumentasi penduduk.</p> <p>4. Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>5. Penggunaan replikasi data kependudukan di kabupaten.</p> <p>6. Pembangunan bank data kependudukan kabupaten dan pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan.</p> <p>7. Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan.</p> <p>8. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk.</p> <p>9. Perlindungan data pribadi penduduk juga data kependudukan kabupaten dan perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.</p> <p>4. Pemantauan dan Evaluasi</p> <p>5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>
6. Pengawasan		<p>Pernyataan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kabupaten.</p>
4. Perkembangan Kependudukan		<p>1. Kebijakan</p> <p>2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian huancas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kabupaten</p>

1	2	3	
	2. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas penduduk, pengarahan kualitas penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas / penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten. 	
	3. Permantauan dan Evaluasi	<p>Pernantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>	
	4. Pengawasan	<p>Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kabupaten.</p>	
5. Perencanaan Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan Penyelenggaraan 	<ol style="list-style-type: none"> Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kabupaten. Penyerahan dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kabupaten dan Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka terib administrasi kependudukan. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kabupaten. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik. Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kabupaten. 	

1	2	3
4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan kabupaten.	
5. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan kabupaten.	

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN**

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH 3
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan 2. Ketenagakerjaan skala kabupaten.	1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah kabupaten, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kabupaten.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	Daya	1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatut pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatut pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten. 3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatut pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pembinaan, pengangkatan, dan pembeheitian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kabupaten.
3. Pembinaan Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja	dan	1. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kabupaten. 3. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kabupaten. 4. Penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri. 5. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kabupaten.

1	2	3
4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	<p>1. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja.</p> <p>2. Penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data pencaker dan data lowongan kerja skala kabupaten.</p> <p>3. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kabupaten.</p> <p>4. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/LPTKS dan Lembaga Penyaluhan dan Bimbingan Jabatan skala kabupaten.</p> <p>5. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyaluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukkan kegiatan skala kabupaten.</p> <p>6. Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair skala kabupaten.</p> <p>7. Fasilitasi penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kabupaten.</p> <p>8. Penyaluhan, Rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/Antar Kejaya Lokal (AKL).</p> <p>9. Penerbitan SPP AKL skala kabupaten.</p> <p>10. Penerbitan rekomendasi izin operasional TKS Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukatela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kabupaten.</p> <p>11. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukatela skala kabupaten.</p> <p>12. Pendafiran dan fasilitasi pembentukan TKA.</p> <p>13. Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten.</p> <p>14. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten yang bersangkutan</p> <p>15. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyerbauan dan penerapan teknologi tepat guna skala kabupaten.</p> <p>16. Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala kabupaten.</p>	<p>i. Pelaksanaan penyaluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKS di wilayah kabupaten.</p> <p>5. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kabupaten berdasarkan asal/alamat calon TKI.</p> <p>6. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kabupaten.</p> <p>7. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala kabupaten.</p> <p>8. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke luar negeri.</p> <p>9. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di kabupaten.</p> <p>10. Penerbitan rekomendasi perizinan tempat penampungan di wilayah kabupaten.</p> <p>11. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kabupaten.</p>
5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri		

	6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kabupaten. 2. Pendaftaran PKB, perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kabupaten. 3. Pencatatan PKWT pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 4. Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten. 5. Pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten atas rekomendasi pusat dan atau provinsi. 6. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan pemutusan perusahaan di wilayah kabupaten. 7. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala kabupaten. 8. Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator, arbiter di wilayah kabupaten. 9. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi kabupaten. 10. Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kabupaten. 11. Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kabupaten kepada gubernur. 12. Pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di wilayah kabupaten. 13. Pembinaan penyeleggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kabupaten. 14. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kabupaten. 15. Verifikasi keanggotaan SP/SB skala kabupaten. 16. Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala kabupaten/kota dan melaporkannya kepada provinsi. 17. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kabupaten/kota berdasarkan hasil verifikasi.
	7. Pembinaan Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten. 4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kabupaten. 5. Pelaksanaan penerapan SMK3 skala kabupaten. 6. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kabupaten. 7. Pengkajian dan perkayaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten. 8. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kabupaten.

		<p>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>10. Fasilitasi pembinaan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>11. penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah</p>
2. Ketransmigrasi-an	<p>1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan peiaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p>
	<p>2. Pembinaan SDM Aparatur</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatuer pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatuer pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatuer pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an di pemerintah kabupaten.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasi-an skala pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasi-an instansi kabupaten.</p>

		<p>9. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>10. Fasilitasi pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>11. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.</p> <p>12. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah daerah/ atau pemerintah provinsi.</p> <p>13. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p> <p>15. Pengusulan kartu PPNS bidang ketenagakerjaan skala kabupaten kepada pemerintah.</p>
2. Ketransmigrasi-an	<p>1. Kebijakan, Pembinaan, dan Pengawasan Perencanaan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>3. Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>4. Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.</p> <p>5. Perancangan pembangunan transmigrasi daerah kabupaten, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an skala kabupaten.</p>
	2. Pembinaan SDM Aparatur	<p>1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatru pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatru pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatru pelaksana urusan pemerintahan bidang ketransmigrasi-an di pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketransmigrasi-an skala pemerintah daerah kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketransmigrasi-an instansi kabupaten.</p>

1	2	3
3. Penyiapan Permukiman dan Penempatan	<ol style="list-style-type: none"> Pengalokasian tanah untuk pembangunan WPT atau LPT di wilayah kabupaten. Pengusulan rencana lokasi pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. Pengusulan rencana kebutuhan SDM untuk mendukung pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. Pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala kabupaten. Penyelesaian legalitas tanah untuk rencana pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. Penetapan alokasi penyediaan tanah untuk rencana pembangunan WPT dan LPT skala kabupaten. Penyediaan data untuk penyusunan rencana teknis pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. KIE ketransmigrasián skala kabupaten. Penyediaan informasi pengembangan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. Pelayanan investasi dalam rangka pembangunan WPT atau LPT skala kabupaten. Penjajagan kerjasama dengan daerah kabupaten/kota lain. Pembuatan naskah kerjasama antar daerah dalam perpindahan dan penempatan transmigrasi. Sinkronisasi pembangunan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. Pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala kabupaten. Penetapan status calon transmigran skala kabupaten berdasarkan kriteria pemerintah. Peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala kabupaten. Pelayanan penampungan calon transmigran skala kabupaten. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyiaian permukiman dan penempatan transmigran di wilayah kabupaten. 	<ol style="list-style-type: none"> Pengusulan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi skala kabupaten. Sinkronisasi peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. Sinkronisasi pengembangan usaha masyarakat di WPT atau LPT dengan wilayah sekitar dalam skala kabupaten. Sinkronisasi pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. Sinkronisasi penyerasian pengembangan masyarakat dan kawasan WPT atau LPT dengan wilayah sekitar skala kabupaten. Penyediaan data dan informasi tentang perkembangan WPT dan LPT skala kabupaten. Pengusulan calon WPT atau LPT yang dapat dialihkan tanggungjawab pembinaan khususnya dalam skala kabupaten Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilayah kabupaten.
4. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		

	5. Pengarahan Dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	<p>1. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketransmigrasi skala kabupaten.</p> <p>2. Penyediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasi skala kabupaten.</p> <p>3. Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>4. Penyamatan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketransmigrasi skala kabupaten.</p> <p>5. Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kabupaten.</p> <p>6. Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>7. Penyusunan rencana pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kabupaten.</p> <p>9. Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi.</p> <p>10. Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi.</p> <p>11. Pelayanan penampungan, pemakanan, kesehatan, petbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi.</p> <p>12. Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi.</p> <p>13. Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi.</p> <p>14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarahan dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kabupaten.</p>
--	--	--

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

TANGGAL : 21 JUNI 2006
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG		KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
1	2	3	4	5
1. Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Pertanian			<p>1. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian tingkat kabupaten.</p> <p>Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>3. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>4. Pemanfaatan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>5. Pengembangan lahan pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>6. Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kabupaten.</p> <p>7. Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.</p> <p>9. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kabupaten.</p>
	2. Air Irrigasi			<p>1. Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan desa.</p> <p>2. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi.</p> <p>3. Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi.</p> <p>4. Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).</p> <p>5. Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi.</p> <p>6. Bimbingan penerapan teknologi optimisasi pengelolaan air untuk usaha tani.</p>
	3. Pupuk			<p>1. Bimbingan penggunaan pupuk.</p> <p>2. Pengawasan pengadaan, pteredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk.</p> <p>4. Bimbingan penyediaan, penyuluran dan penggunaan pupuk.</p> <p>5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk.</p> <p>6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.</p>

Pengembangan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kabupaten.	
2.	Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida.
3.	Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida.
4.	Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida.
5.	Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
6.	<p>1. Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar.</p> <p>4. Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian.</p> <p>5. Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kabupaten.</p> <p>6. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian.</p> <p>7. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian.</p> <p>8. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita.</p> <p>9. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.</p> <p>10. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.</p>
5. Alat dan Mesin Pertanian	<p>1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah kabupaten.</p> <p>3. Pemanfauan benih dari luar negeri di wilayah kabupaten.</p> <p>4. Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah kabupaten.</p> <p>5. Pengaturan penggunaan benih wilayah kabupaten.</p> <p>6. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih.</p> <p>8. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.</p> <p>10. Pemberian izin produksi benih.</p> <p>11. Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi.</p> <p>12. Perbanyakan dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman.</p> <p>13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.</p> <p>14. Penetapan sentra produksi benih tanaman.</p> <p>15. Pengembangan sistem informasi perbenihan.</p> <p>16. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah kabupaten.</p> <p>17. Pembinaan dan pengawasan balai benih swasta.</p>
6. Benih Tanaman	

Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk agribisnis	
1.	Bimbining penyusunan rencana usaha agribisnis.
2.	Bimbining pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan.
3.	Pengawasan penyuluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
4.	Pengawasan penyuluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.
5.	Perlindungan Tanaman
6.	Bimbining pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
7.	Pemantauan informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
8.	Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
9.	Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah kabupaten.
10.	Teknis Budidaya
11.	Pembinaan Usaha
12.	Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
13.	Pemasaran

			2. Bimbingan pembangunan sarana usaha wilayah kabupaten.
			penyebarluasan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan permasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah kabupaten.
15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Lahan Perkebunan	1. Penetapan kebutuhan dan pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 2. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 3. Pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten. 4. Pemetaan potensi dan pengetahuan lahan perkebunan wilayah kabupaten. 5. Pengembangan lahan perkebunan wilayah kabupaten.. 6. Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah kabupaten. 7. Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 8. Penetapan sasaran areal tanam wilayah kabupaten.	1. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. Perkebunan	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan	1. Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan. 2. Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan. 3. Pemanfaatan dan evaluasi pemakaian air untuk perkebunan. 4. Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan. 5. Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan. 6. Pemanfaatan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.	2. Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan
	3. Pupuk	1. Bimbingan penggunaan pupuk. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kabupaten. 3. Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk. 4. Bimbingan penyediaan, penyuluran dan penggunaan pupuk. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.	3. Pupuk
	4. Pestisida	1. Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kabupaten. 2. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida. 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida. 4. Bimbingan penyediaan, penyuluran dan penggunaan pestisida. 5. Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida. 6. Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.	4. Pestisida

3. Alat dan Mesin Perkebunan

Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah kabupaten.

1. Pengembangan alat dan mesin perkebunan sesuai standar.
2. Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan.
3. Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah kabupaten.
4. Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan.
5. Pemberian izin pengadaan dan pereدارan alat dan mesin perkebunan.
6. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita.
7. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan.
8. Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
9. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
10. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
11. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
12. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten.
13. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.
14. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.
15. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
16. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
17. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
18. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
19. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
20. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
21. Perbanyakkan dan penyuluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
22. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
23. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
24. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
25. Pembangunan dan pengelolaan balai benih milik swasta.
26. Pembinaan dan pengawasan balai benih perkebunan.
27. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
28. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
29. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan miko pedesaan.
30. Pengawasan penyuluran, pemantauan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

6. Benih Perkebunan

1. Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
2. Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah kabupaten.
3. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal.
4. Pemantauan benih impor wilayah kabupaten.
5. Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah kabupaten.
6. Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah kabupaten.
7. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan.
8. Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan.
9. Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan.
10. Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
11. Pemberian izin produksi benih perkebunan.
12. Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi.
13. Perbanyakkan dan penyuluran mata tempel dan benih perkebunan tanaman.
14. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk.
15. Penetapan sentra produksi benih perkebunan.
16. Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan.
17. Pembangunan dan pengelolaan balai benih milik swasta.
18. Pembinaan dan pengawasan balai benih perkebunan.
19. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
20. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
21. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan miko pedesaan.
22. Pengawasan penyuluran, pemantauan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

7. Pembiayaan

1. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan.
2. Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan.
3. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan miko pedesaan.
4. Pengawasan penyuluran, pemantauan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten.

		Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
2.		Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah kabupaten.
3.		Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
4.		Penyediaan dukungan pengendalian, eradicasi tanaman dan bagian tanaman wilayah kabupaten.
5.		Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim wilayah kabupaten.
6.		Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tumbuhan tanaman wilayah kabupaten.
7.		Pengangunan gangguan usaha perkebunan wilayah kabupaten.
8.		
9.	Perizinan Usaha	1. Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten. 2. Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di wilayah kabupaten.
10.	Teknis Budidaya	Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah kabupaten.
11.	Pembinaan Usaha	1. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kabupaten. 3. Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kermitraan usaha perkebunan.
12.	Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten. 3. Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 5. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten. 6. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah kabupaten.
13.	Pemasaran	1. Bimbingan pemantauan hasil perkebunan wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten. 4. Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah kabupaten.
14.	Sarana Usaha	1. Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten.

		<p>15. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan.</p> <p>1. Penyusunan statistik perkebunan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten.</p>
<p>3. Peternakan dan Kesehatan Hewan</p>	<p>1. Kawasan Peternakan</p> <p>2. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)</p>	<p>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</p> <p>4. Pengembangan lahan hijauan pakan.</p> <p>5. Penetapan padang pengembalaan.</p> <p>Penetapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kajian, pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten.</p>

	<p>3. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet</p> <p>4. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaman Biologis</p>	<p>Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengolahan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</p> <p>Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Pengawasan pereedaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</p> <p>Bimbingan pereedaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</p> <p>Pelaksanaan peneritian perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan peneritian penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premix wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOH) wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>Pengadaan, perbaikan dan penyulaman benih hijauan pakan wilayah kabupaten.</p> <p>Penyelegaraan kebutuhan benih hijauan pakan.</p> <p>Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan usaha mini feedmill pedesaan (home industry) wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten.</p> <p>Bimbingan kerjasama perlusas produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten</p>
--	---	--

5. Pakan Ternak

	<p>6. BIBIT TERNAK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan standar petribitan dan plasma mutlah wilayah kabupaten. 2. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten. 3. Bimbingan pembuatan dan pengesahan sifilisilah ternak. 4. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten. 5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten. 6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten. 7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten. 8. Bimbingan pelestarian plasma mutlah peternakan wilayah kabupaten. 9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen betuk wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten. 11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat. 12. Produksi mani betuk ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. 13. Bimbingan produksi mani betuk lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten. 14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi petribitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten. 15. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten. 16. Pelaksanaan penetapan penyuluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. 17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten. 18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten. 19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten. 20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten. 21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten. 22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten. 23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten. 24. Bimbingan pemantauan produksi mani betuk ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten. 25. Bimbingan pengadaan produksi mani betuk ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten. 26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. 27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten. 28. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten. 29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi petribitan wilayah kabupaten.
	<p>7. Pembiayaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten. 2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten. 4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan dan pengawasan penyuluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten.

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Pembinaan dan pengawasan praktik hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. Pengawasan lalu lintas produk temak dari/ke wilayah kabupaten/kota. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. Bimbingan pembangunan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan wilayah kabupaten. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan wilayah kabupaten. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. Pengawasan lalu lintas temak, produk temak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan). Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. Bimbingan pelaksanaan perekalan perekalan produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan perekalan perekalan produk pangan larangan pemotongan dan pengawasan larangan pemotongan hewan.
	2. Pembinaan dan pengawasan praktik hygiene sanitasi pada produsen dan tempat penjualan PAH. 3. Monitoring penerapan persyaratan hygiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV. 4. Pengawasan lalu lintas produk temak dari/ke wilayah kabupaten/kota. 5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan. 6. Bimbingan pembangunan dan pengawasan pelayanan kesehatan hewan wilayah kabupaten. 7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan wilayah kabupaten. 8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten. 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. 10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten. 11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten. 13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 15. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten. 16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten. 17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten. 18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan. 19. Pengawasan lalu lintas temak, produk temak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten. 20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktik dokter hewan mandiri, klinik hewan). 21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan. 22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan. 23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar. 24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu. 25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil). 26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i> . 27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan. 28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah. 29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah. 30. Bimbingan pelaksanaan perekalan perekalan produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan. 31. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan perekalan perekalan produk pangan larangan pemotongan dan pengawasan larangan pemotongan hewan.

Bimbingan pelaksanaan penelitian zoootik penyakit hewan non pangan.

33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewan non pangan.

34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten.

36. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten.

37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.

38. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

39. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parásiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.

41. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.

42. Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan.

43. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten.

1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten.

2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten.

3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten.

4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten.

5. Bimbingan pelaksanaan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.

6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten.

7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten.

8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten.

9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon pengaduh wilayah kabupaten.

10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.

11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh.

12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.

13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.

14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten.

2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.

3. Pemberian izin praktik dokter hewan.

4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.

5. Pendaftaran usaha peternakan.

6. Pemberian izin usaha RPH/RPU.

	<p>Permantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten. 10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten.
	<p>11. Bimbingan dan permantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten.</p> <p>12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</p> <p>13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</p> <p>14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten.</p> <p>15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten.</p> <p>16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</p> <p>17. Bimbingan standar teknis unit usaha produksi pangan asal hewan wilayah kabupaten.</p> <p>18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten.</p>
	<p>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>3. Bimbingan permantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten.</p> <p>4. dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten.</p> <p>5. Bimbingan peringkatkan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.</p> <p>6. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten.</p> <p>7. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>8. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>9. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten.</p> <p>10. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</p> <p>11. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil olahan peternakan dan keswan.</p> <p>12. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>13. Bimbingan permantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten.</p> <p>14. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>15. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten.</p> <p>16. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten.</p>
	<p>11. Pembinaan Usaha</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten. 2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten.
12. Sarana Usaha	

	13. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten. 4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten. 5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten.
14. Pemasaran		<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten. 2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten. 3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.
15. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan keswan.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan sistem perstatistikkan dan informasi peternakan wilayah kabupaten. 2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten. 3. Bimbingan penerapan perstatistikian peternakan dan keswan wilayah kabupaten. 4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten.
4. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat. 2. Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal. 3. Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan. 4. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan. 5. Identifikasi cadangan pangan masyarakat. 6. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu kabupaten. 7. Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat. 8. Penanganan dan penyeluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kabupaten. 9. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan. 10. Identifikasi kelompok rawan pangan. 11. Identifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 12. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten. 13. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan. 14. Informasi harga di kabupaten. 15. Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten. 16. Identifikasi pangan pokok masyarakat. 17. Peningkatan mutu konsumsi masyarakat. 18. Pembinaan dan pengawasian mutu dan keamanan produk pangan masyarakat. 19. Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat.

	<p>21. Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikkan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>22. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.</p> <p>23. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten.</p> <p>24. Pengembangan "trust fund" di kabupaten.</p> <p>25. Pengalokasian APBD kabupaten/kota untuk ketahanan pangan.</p> <p>26. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten.</p>
2. Keamanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar BMR wilayah kabupaten. 2. Pelatihan inspektor, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten. 3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan kabupaten. 4. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten.
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten. 2. Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah kabupaten. 3. Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumput ilmu hayat dan non rumput ilmu hayat) di wilayah kabupaten. 4. Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
2. Penunjang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian. 2. Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah kecamatan/desa. 3. Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota sesuai norma dan standar. 4. Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluhan pertanian. 5. Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian. 6. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. 7. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten. <p>Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian.</p>
3. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografinya pada satu kabupaten. 2. Izin penggunaan varietas lokal untuk pembuatan varietas turunan esensial yang sebaran geografinya pada satu kabupaten.
4. Perlindungan Varietas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat. 2. Pengawasan perrusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemakaian SDG yang ada di wilayahnya.
5. Sumber Daya Genetik (SDG)	

2. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah.

3. Koordinasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.

4. Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan.

5. Rekomendasi aspek teknis, sosial dan bisnis dalam rencana pemberlakuan wajib SNI serta mengusulkan usulan pemberlakuan wajib SNI.

6. Penerapan sistem manajemen mutu kelembagaan dalam rangka proses akreditasi di kabupaten.

7. Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kabupaten/kota.

8. Pengembangan pembinaan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi sektor pertanian di kabupaten.

9. Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian.

10. Fasilitasi penyebarluasan dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di kabupaten.

11. Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di kabupaten.

12. Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG BIDANG
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA 3
1. Pengarusutamaan Gender (PUG)	<p>1. Kebijakan Pelaksanaan PUG</p> <p>2. Kelembagaan PUG</p> <p>3. Pelaksanaan PUG</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasti pelaksanaan PUG skala kabupaten.</p> <p>1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala kabupaten.</p> <p>3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.</p> <p>1. Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi KIE PUG skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p>Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p> <p>Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p>
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	<p>1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan</p> <p>3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan.</p> <p>4. Kebijakan Perlindungan Perempuan</p> <p>5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan</p>	<p>Penyelenggaraan kebijakan kabupaten peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p>Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p>Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala kabupaten.</p> <p>Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p> <p>Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.</p>

	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kabupaten.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan. 3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kabupaten. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatkan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.	Fasilitasi penguatkan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kabupaten. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekomendasi sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kabupaten.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpisah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait. 2. Data dan Informasi Gender dan Anak	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten dengan menitik pada kebijakan nasional. 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.

1	2	3
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	1. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilih menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kabupaten. 2. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi <i>gender</i> dan anak skala kabupaten. 3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kabupaten.	

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG 1	SUB SUB BIDANG 2	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA 3
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<p>1 Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten.</p> <p>2 Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.</p> <p>3 Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>4 Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>5 Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C.</p> <p>6 Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe C.</p> <p>7 Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan Tipe C.</p> <p>8 Pembangunan terminal angkutan barang.</p> <p>9 Pengoperasian terminal angkutan barang.</p> <p>10 Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.</p> <p>11 Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12 Pemberian izin trayek angkutan perdesaan/angkutan kota.</p> <p>13 Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>14 Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten.</p> <p>15 Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten.</p> <p>16 Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa.</p> <p>17 Pemberian izin usaha angkutan pariwisata.</p> <p>18 Pemberian izin usaha angkutan barang.</p> <p>19 Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten.</p>

1	2	3
		<p>20 Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten.</p> <p>21 Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>22 Penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten.</p> <p>23 Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>24 Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu kabupaten.</p> <p>25 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>26 Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>27 Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten.</p> <p>28 Pelaksanaan penyidikan pelanggaran Perda Kabupaten bidang LLAJ. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. Pelanggaran ketentuan pengujian berkaia. Perizinan angkutan umum.</p> <p>29 Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten.</p> <p>30 Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.</p> <p>31 Pemberian izin usaha Bengkel umum kendaraan bermotor.</p> <p>32 Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.</p> <p>33 Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>34 Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten.</p> <p>35 Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.</p> <p>1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau dalam kabupaten. 2. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 3. Penetapan lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten. 4. Pengadaan kapal SDP. 5. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan. 6. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau. 7. Pembangunan pelabuhan SDP. 8. Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan. 9. Penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>

1	2	3
		<p>10. Pemberian rekomendasi rencana induk, DLK/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi, nasional dan antar negara.</p> <p>11. Penetapan rencana induk, DLK/DLKp pelabuhan SDP yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>12. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>13. Izin pembuatan tempat penimbunan kayu (logpon), jaring terapung dan kerambah di sungai dan danau.</p> <p>14. Pemetaan alur sungai kabupaten untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>15. Pembangunan, pemeliharaan, pengurusan alur pelayaran sungai dan danau kabupaten.</p> <p>16. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>17. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi dalam kabupaten.</p> <p>18. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>19. Penetapan tarif jasa pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang dikelola kabupaten.</p> <p>20. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.</p> <p>21. Pengawasan pengoperasian penyeleggaran angkutan sungai dan danau.</p> <p>22. Pengawasan pengoperasian penyeleggaran angkutan penyeberangan dalam kabupaten pada jaringan jalan kabupaten.</p>
2. Perhubungan Udara	Bandar Udara	<p>1. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>3. Penetapan /izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara < 30 tempat duduk.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSSBY

NOMOR : 1 TAHUN : 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEH SINTANG
1	2	3
1. Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak	<p>1 Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>2 Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>3 Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kabupaten.</p> <p>4 Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran: "<i>Unmet Need</i>", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>5 Penyeriasian dan penetapan kriteria serta kelangsungan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten...</p> <p>6 Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kabupaten.</p> <p>7 Pemantauan tingkat <i>drop out</i> peserta KB.</p> <p>8 Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluhan KB.</p> <p>9 Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB.</p> <p>10 Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi.</p> <p>11 Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).</p> <p>12 Pembinaan penyuluhan KB.</p> <p>13 Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.</p>

1	2	3	
			<p>14 Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau.</p> <p>15 Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kabupaten.</p> <p>16 Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kabupaten.</p> <p>17 Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kabupaten.</p> <p>18 Pelaksanaan <i>informed choice</i> dan <i>informed consent</i> dalam program KB.</p>
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi		<p>1 Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.</p> <p>2 Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>3 Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kabupaten.</p> <p>4 Penyeriasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>5 Penyeienggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>6 Penyeienggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kabupaten.</p> <p>7 Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>8 Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p> <p>9 Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten/kota.</p> <p>10 Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kabupaten.</p> <p>11 Pemantauan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kabupaten.</p>
3. Ketahanan Pemberdayaan Keluarga	Kebijakan dan Pengembangan Ketahanan Pemberdayaan Keluarga	1 2 3 4 5 6 7	<p>1 Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2 Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>3 Penyeriasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>4 Penetapan sasaran Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kabupaten.</p> <p>5 Penyeienggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kabupaten.</p> <p>6 Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p> <p>7 Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kabupaten.</p>

8	Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kabupaten.			
9	Pelaksanaan pendampingan/ magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kabupaten.			
10	Pelaksanaan keritraaan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemaseran guna peningkatan UPPKS skala kabupaten.			
11	Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kabupaten			
4.	Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	1	Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.	
		2	Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.	
		3	Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kabupaten/kota.	
		4	Penetapan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluhan KB.	
		5	Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional.	
		6	Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluhan KB.	
		7	Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian.	
		8	Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional.	
		9	Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.	
		10	Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluhan KB.	
		11	Penyediaan dukungan operasional penyuluhan KB.	
		12	Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional.	
		13	Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional.	
		14	Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian.	
		15	Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten.	
		16	Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.	
		17	Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatihan kritis kabupaten.	
		18	Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyijapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kabupaten.	
		19	Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan Kinerja SDM.	
5.	Advokasi dan Komunikasi, Kebijakan dan Pelaksanaan Informasi, dan Edukasi (KIE)	1	Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kabupaten.	
		2	Penyelenggaraan operasional advokasi KIE skala kabupaten.	
		3	Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kabupaten.	
		4	Penyeriasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kabupaten.	

1	2	3	
6. Informasi dan Data Mikro dan Kependudukan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>5 Pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR.</p> <p>6 Pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengualan kelembagaan dan jaringan institusi program KB.</p> <p>7 Pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengualan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.</p> <p>8 Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.</p>	
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasan dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	<p>1 Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>2 Penyelegaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>3 Pemanfaatan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>4 Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten.</p> <p>5 Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional.</p> <p>6 Permutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.</p> <p>7 Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyampaian sarana dan prasarana.</p> <p>8 Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah.</p> <p>9 Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.</p>	
8. Pembinaan	Kebijakan Pembinaan	<p>1 Penyelenggaran kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspек kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.</p> <p>2 Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p> <p>3 Penyerasan isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.</p> <p>4 Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.</p>	<p>Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten.</p> <p>BUPATI SINTANG, </p>

LAMPIRAN X VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	1	2	3
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	1.	1. Penyelenggaraan pelayanan pos di perdesaan. 2. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 3. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 4. Peneritian jasa titipan untuk kantor agen.	
	2. Telekomunikasi	2.	1. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 2. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal <i>wideband to end</i> cakupan kabupaten. 3. Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 4. Pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G). 5. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya. 6. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator. 7. Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.	
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	3.	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 2. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten. 3. Pemberian izin <i>Hinder Ordonantie</i> (Ordonansi Gangguan). 4. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 5. Pemberian izin instalansi genset.	
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi.	4.	1. Pengendalian dan peneritian terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi. 2. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.	

1	2	3
5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi.	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.	
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	<p>1. Penyiaran</p> <p>2. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah</p> <p>3. Kemitraan Media</p>	<p>1. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio.</p> <p>2. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.</p> <p>Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
1	2	3	4	5	6
1. Izin Lokasi				<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. 2. Kompliasi bahan koordinasi. 3. Pelaksanaan rapat koordinasi. 4. Pelaksanaan peninjauan lokasi. 5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan perimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kabupaten dan perimbangan teknis lainnya dari instansi terkait. 6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan. 7. Penerbitan surat keputusan izin lokasi. 8. Perimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi dengan perimbangan kepada kantor pertanahan kabupaten. 9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah. 	
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum				<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan lokasi. 2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pelaksanaan penyuluhan. 4. Pelaksanaan inventarisasi. 5. Pembentukan Tim Penilai Tanah. 6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari lembaga/Tim Penilai Tanah. 7. Pelaksanaan musyawarah. 8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. 9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. 10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. 11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten. 	
3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. 2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. 3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. 4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. 5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak. 	

1	2	3
4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Sanitasi Tanah Untuk Pembangunan.	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim pengawasan pengendalian. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan sanitasi tanah untuk pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan panitia perlindungan <i>land reform</i> dan sekretariat panitia. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absenee. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan tanah absenee sebagai obyek <i>land reform</i> berdasarkan hasil sidang panitia. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absenee berdasarkan hasil sidang panitia. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribution Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absenee.		
6. Penetapan Tanah Ulayat	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan panitia peneliti. Penelitian dan kompliasi hasil penelitian. Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat. Pengusulan rancangan peraturan daerah tentang penetapan tanah ulayat. Pengusulan petaan dan pencatatan tanah ulayat dalam daftar tanah kepada kantor pertanahan kabupaten. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim. Penetapan biuang bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh kepala desa/furah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian.
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		

<p>8. Izin Pembuka Tanah</p> <p>1. Pemeriksaan dan pemeriksaan permoohonan.</p> <p>2. Pemeriksaan lapang dengan memperhatikan kemampuan tanah, status tanah dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota.</p> <p>3. Penelitian izin membuka tanah dengan mer perhatikan pertimbangan teknis dari kantor pertanahan kabupaten/kota.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian penggunaan izin memt uk tanah. (Tugas Femabtu n)</p>	<p>1. Pemenuhan tim koordinasi tingkat kabupaten.</p> <p>2. Komisi ilasi data dan informasi yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Peta pola Penatagunaan tanah atau peta persidaan tanah dari kantor pertanahan 2) Rencana Tata Ruang Wilayah. 3) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kabupaten, maupun investasi swasta. <p>3. Analisis letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait.</p> <p>4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait.</p> <p>6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah.</p> <p>8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam perijinan tanah kejalan ben ut peta dan penjelasannya dengan Kepatuhan Bupati..</p> <p>9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW di perkembangan.</p> <p>10. Evaluasi dan penyusuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan RTRW di perkembangan.</p>
<p>12. Perencanaan Penggunaan Wilayah Kabupaten</p>	<p>BUPATI SINTANG,</p>  <p>MILTON CROSBY</p> 

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERTAHANAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN\KOTA
1	2	3
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	<p>Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p>
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan	<p>Kordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelektual, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.</p>

1	2	3
3. Pembinaan Penyelegaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelegaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelekam, bina masyarakat, perbaasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.	Pembinaan dan penyelegaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelekam, bina masyarakat perbaasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
4. Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelegaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelekam, bina masyarakat perbaasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelekam, bina masyarakat, perbaasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur		
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Penyelegaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 3. Pembinaan Penyelegaraan Pemerintahan 4. Pengawasan Penyelegaraan Pemerintahan 5. Peningkatan Kapasitas Aparatur 	<p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.</p> <p>Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.</p> <p>Pengawasan penyelegaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparatut kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.</p>
4. Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Penyelegaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan 	<p>Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.</p>

1	2	3
3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.	Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kegiatan	Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perlaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten. Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perlaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.
5. Ketahanan Ekonomi	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perlaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

1	2	3
4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur	<p>Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p> <p>Peningkatan kapasitas aparat kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSSY

LAMPIRAN XX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
 ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN**

SUB BIDANG		SUB SUB BIDANG		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	
1	2	1	2	3	3
1. Otonomi Daerah	1. Urusan Pemerintahan : a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). e. Database	1. Urusan Pemerintahan : a. Kebijakan b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten. c. Harmonisasi d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). e. Database	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten. 1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta Pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kabupaten. 1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kabupaten dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi. 1. Penyusunan LPPD kabupaten. 2. Penyampaian LPPD kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Pengolahan database LPPD skala kabupaten.	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten. 1. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka perataan daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 1. Pengusulan pembentukan kecamatan. 2. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 1. Pengusulan pembentukan kecamatan. 2. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.	1. Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kabupaten. 1. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka perataan daerah. 2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. 1. Pengusulan pembentukan kecamatan. 2. Pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibukota daerah. 4. Pelaksanaan perubahan batas, nama kabupaten dan pemindahan ibukota kabupaten.

<p>1</p> <p>2</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus.</p>	<p>3</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelegaraan penataan daerah. 2. Penyelegaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelegaraan penataan daerah dan otsus.</p>	<p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah dan Otsus.</p> <p>e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah dan Otsus.</p> <p>f. Pelaporan</p> <p>3. Fasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL)</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. DPRD</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>b. Kebijakan</p>
<p>1</p> <p>2</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus.</p>	<p>1. Penyelegaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten. 2. Penyelegaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dan otsus dalam wilayah kabupaten.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala kabupaten/kota ke provinsi dan pemerintah. 2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kabupaten.</p> <p>1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala kabupaten. 3. Penyampaikan laporan penataan daerah skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.</p> <p>1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kabupaten/kota untuk sidang DPOD. 2. Penyiapan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.</p> <p>1. Penyusunan Perda kabupaten. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada gubernur. 3. Menyampaikan Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi.</p> <p>Membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.</p> <p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala kabupaten.</p> <p>Penerapan SPM kabupaten.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah dan Otsus.</p>

<p>1.</p>	<p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah. 2. Penetapan rencana tindak peringkatan kapasitas kabupaten. <p>(2) Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Implementasi rencana tindak peringkatan kapasitas kabupaten. 2. Fasilitasi implementasi rencana tindak kabupaten. <p>(3) Pembinaan</p>	<p>1. Koordinasi pengembangan kapasitas kabupaten.</p>
<p>2.</p>	<p>d. Pejabat Negara :</p> <p>a. Tata Tertib DPRD :</p> <p>Kebijakan</p> <p>b. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH.</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>c. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD :</p> <p>Kebijakan</p> <p>d. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH :</p> <p>Kebijakan</p> <p>e. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)</p> <p>KDH :</p> <p>Kebijakan</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD kabupaten.</p> <p>Fasilitasi pemilihan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten.</p> <p>Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati.</p> <p>Pelaksanaan pedoman LKPJ bupati.</p>
<p>3.</p>	<p>e. Pemerintahan Umum</p>	<p>1. Fasilitasi Dekonentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :</p> <p>a. Fasilitasi Tugas Pembantuan</p> <p>1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaskan pembantuan kepada desa.</p>

<p>1</p>	<p>b. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</p> <p>c. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>d. Pembinaan Wilayah</p> <p>e. Koordinasi Pelayanan Umum.</p> <p>2. Translumb dan Lintas :</p> <p>a. Keteritiban, Keteritiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>3. Wilayah Perbatasan dan Penegakan Hukum Asasi Manusia (HAM).</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga. 3. Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak ketiga kepada provinsi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten/kota. 2. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kabupaten kepada provinsi. <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/desa/kelurahan di wilayahnya. 4. Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kabupaten. 5. Koordinasi dan fasilitasi penyelegaraan urusan pemerintahan sisa skala kabupaten. <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: <ul style="list-style-type: none"> (a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah. (b) Keteritiban umum dan keteritiran masyarakat. (c) Kepolisipan monoprajaan dan PPNS. (d) Perlindungan masyarakat. 2. Pelaksanaan keteritiban umum dan keteritiran masyarakat skala kabupaten. 3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala kabupaten. 4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kabupaten. 5. Koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten. <p>Koordinasi penegakan HAM skala kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hukum Asasi Manusia (HAM). 3. Wilayah Perbatasan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Perbatasan <ul style="list-style-type: none"> - Antarnegara b. Perbatasan Daerah
-----------------	---	---

1	2	3
3.	C. Toponimi dan Pemetaan Wilayah	<p>1. Penetapan kebijakan kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala kabupaten.</p>
4.	d. Pengembangan Wilayah Perbatasan	<p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala kabupaten.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan kabupaten.</p>
5.	e. Penetapan Luas Wilayah	<p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah kabupaten/kota yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>
6.	4. Kawasan Khusus :	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kabupaten.</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam: Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.</p> <p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya.</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum.</p> <p>d. Kawasan Perairan dan Kedirgantaraan.</p>
7.	5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala kabupaten/kota.</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana.</p> <p>b. Penanganan Bencana</p>

1	c. Penanganan Pasca Bencana. d. Kelembagaan	Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala kabupaten. Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala kabupaten.
e. Penanganan Kebakaran		Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kabupaten.
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Anggaran Daerah	<p>Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah Kabupaten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar-satuan harga dan analisis standar belanja daerah kabupaten. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara kabupaten/kota dan desa. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa. <p>3. Pendapatan dan Investasi Daerah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pajak dan Retribusi Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten. 3. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa. 4. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kabupaten. 5. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya. b. Investasi dan Aset Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 3. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah kabupaten. 4. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kabupaten. <p>4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga Keuangan Mikro</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan BUMD dan lembaga Keuangan Mikro 2. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan BUMD dan lembaga Keuangan Mikro 3. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan BUMD dan lembaga Keuangan Mikro

1	5. Pinjaman Daerah	2	<p>6. Dana Perimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Dana Alokasi Khusus (DAK) c. Dana Bagi Hasil (DBH) <p>7. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. 3. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten. <p>Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan DAU kabupaten. 2. Pelaporan pengelolaan DAU kabupaten. 3. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK. <p>Usulan pengelolaan DAK (bagi kabupaten yang menerima DAK).</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.. 2. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH kabupaten. 3. Penyiapan data realisasi penerima DBH kabupaten. 4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH. <p>Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan APB desa. 2. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 3. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. 4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>). 5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa. <p>Penetapan pedoman umum tentang perangkat daerah skala kabupaten.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten. 3. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten. 4. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten. 5. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten. 6. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah. <p>Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningdaian bantuan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Peningdaian bantuan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten.
4. Perangkat Daerah			<p>1. Kebijakan.</p> <p>2. Pengembangan Kapasitas</p> <p>3. Pembinaan dan Pengendalian.</p> <p>4. Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kabupaten.</p> <p>5. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah.</p> <p>Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Peningdaian bantuan monitoring dan evaluasi perangkat daerah. 2. Peningdaian bantuan <i>database</i> perangkat daerah skala kabupaten.

5. Kepegawaian
1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 6. Kenaikan Pangkat
 7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan
 8. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi.
 9. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri.
 10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana.
 11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Penyusunan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.

Penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.

Usulan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.

1. Penyusunan pengadaan PNSD kabupaten.
2. Usulan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai).
1. Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
2. Pelaksanaan pengangkatan CPNSD di lingkungan kabupaten.
3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan. sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
- Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kabupaten.
1. Penetapan kebutuhan diklat PNSD kabupaten.
2. Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat kabupaten.
3. Pelaksanaan diklat skala kabupaten.
1. Penetapan kenaikkan pangkat PNSD kabupaten menjadi golongan ruang I/b s/d III/d.
2. Usulan penetapan kenalkan pangkat amurka dan pengabdian.
1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kabupaten dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sekda kabupaten.
2. Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten.
3. Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian eselon II PNS kabupaten.
- Penetapan perpindahan PNSD kabupaten.
- Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di kabupaten.
- Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
10. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana.
11. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten golongan III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CPNSD kabupaten.

1	12. Pemulakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS) 13. Pengawasan dan Pengendalian 14. Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).	Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku di kabupaten/kota. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kabupaten.
6. Persandian	1. Kebijakan 2. Pembinaan SDM 3. Pembinaan Palsan 4. Pembinaan Sissan	<p>1. Penyelegaraan persandian skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelegaraan palsan skala kabupaten.</p> <p>3. Penyelegaraan sisan skala kabupaten.</p> <p>4. Penyelegaraan kelembagaan persandian skala kabupaten.</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kabupaten.</p> <p>2. Rekrutmen calon SDM persandian skala kabupaten.</p> <p>3. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan palsan skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelegaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kabupaten.</p> <p>3. Pemeliharaan palsan tingkat Kabupaten.</p> <p>4. Penghapusan palsan skala kabupaten.</p> <p>1. Perencanaan kebutuhan sisan skala kabupaten.</p> <p>2. Pengadaan sisan untuk jaring persandian skala kabupaten.</p> <p>3. Penyelegaraan protap penyimpanan sisan skala kabupaten.</p> <p>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sisan jaring persandian skala kabupaten.</p> <p>5. Pembinaan Kelembagaan</p>

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

NOMOR : 1 TAHUN
TANGGAL : 31 JULI
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	2	3
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 	
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten. 	
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten. 	
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten. 	
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten. 	
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 3. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten. 	

2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten.
2. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten.
	3. Pemberdayaan Perempuan	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten.

		<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan dengan masyarakat skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan masyarakat skala kabupaten.</p>
		<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lingkungan skala kabupaten.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.</p> <p>5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten.</p>
		<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan lahan dan pesisir skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan pemantauan lahan dan pesisir perdesaan skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemantauan lahan dan pesisir skala kabupaten.</p>
		<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemantauan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.</p> <p>2. Pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten.</p>
		<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pemantauan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantauan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</p>
		<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p> <p>2. Penyelektaran dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p>
		<p>1. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna</p> <p>2. Pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p> <p>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p>
		<p>1. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan</p> <p>2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan</p> <p>3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan</p> <p>4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan</p> <p>5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna</p> <p>6. Pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten.</p>

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG SOSIAL

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	3
1	2	Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau rasional.
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyelegaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten.
4. Pembinaan Bidang Sosial		Identifikasi, sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).		Pelaksanaan program / kegiatan bidang sosial skala kabupaten.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pengangkatan dan pembenhtian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kabupaten.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		

1	13. Penganugerahan Tanda Kehormatan	2	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten.
14.	Nilai-nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai 2. Pemeliharaan Taman Makam (TMP)	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten.
		3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
		4. Penyelenggaraan Hari Peringatan Pahlawan dan Kesetiakawanan Sosial Nasional	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten.
	15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala kabupaten.
	16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.
	17. Undian		1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten.
	18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu.		Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlanjur yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten.
	19. Pengasuhan dan Pengangkutan Anak		Pemberian rekomendasi pengangkutan anak skala kabupaten.

BUPATI SINTANG,

MULTON CROSBY

APIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		
1	2	3	4
1. Kebijakan Bidang Kebudayaan	1. Kebudayaan	1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten.	
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.	
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.	
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerji bangsa.	
	2. Tradisi	1. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.	
		2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten.	
	3. Perfilman	1. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten.	
		2. Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan.	
		3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman.	
		4. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.	
		5. Pengawasan dan pendataan film dan rekanan video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten.	
		6. Pengawasan dan laporan pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten.	
		7. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.	
		8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten.	

	<p>4. Kesenian</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten. Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.
5. Sejarah	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten. Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten.

		<p>6. Purbakala</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity: Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kabupaten. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten. Penetapan BCB/situs skala kabupaten. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten. Penerapan pedoman penelitian arkeologi. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten.
2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan	1. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat, Pengembangan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat dan Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi Pelaksanaan dan hasil kegiatan, Pengendalian dan pengawasan kegiatan, pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat, pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten, Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten. Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten. Perizinan membangun BCB ke luar kabupaten dalam satu provinsi. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kabupaten. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kabupaten. Pelaksanaan Kongres sejarah tingkat daerah di kabupaten. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kabupaten. Pelaksanaan seminar / lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kabupaten. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kabupaten. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kabupaten. Pemeliharaan sejarah skala kabupaten. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kabupaten.

		<p>23. Penanggaman perimdaungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs warisan budaya dunia skala kabupaten.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan skala kabupaten.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kabupaten.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkutan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 (empat) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum kabupaten.</p> <p>30. Registrasi museum dan koleksi di kabupaten.</p> <p>31. Penyelenggaraan akreditasi museum di kabupaten.</p> <p>32. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kabupaten.</p>
3. Kebijakan Bidang Kepariwisataan	Kebijakan	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. RIPP kabupaten. b. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sistem informasi pariwisata. c. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata. d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten. e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten. f. Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten. g. Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/even/budaya dan pariwisata skala kabupaten. h. Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten. i. Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten. <p>2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten.</p> <p>5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kabupaten.</p>
4. Pelaksanaan Bidang Kepariwisataan	Penyelenggaraan	<p>1. Penyelenggaraan promosi skala kabupaten :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten/kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata. b. Peserta/penyelenggara pameran / event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi. c. Pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten. d. Pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam negeri skala kabupaten. e. Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten. f. Pelaksanaan even/promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.

	<p>2. Pengembangan sistem informasi permasaran pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Penerapan <i>banding</i> pariwisata nasional dan penelitian <i>ragline</i> pariwisata skala kabupaten.</p>
5. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	<p>1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kabupaten bekoordinasi dengan Balai Arkeologi.</p>

BUPATI SINTANG,



MULTON CROSBY

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 MATERIKAN : XXIV
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1. Statistik Umum	Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala kabupaten/kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi a. Sensus b. Survei Antar Sensus c. Survei Berskala Nasional d. Survei Sosial dan Ekonomi	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala kabupaten. Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala kabupaten. Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat kabupaten/kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala kabupaten.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala kabupaten.

BUPATI SINTANG,


MILTON CROSBY

TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG KEARSIPAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG		
1	2	3	Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan kabupaten berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
• Kearsipan	1. Kebijakan	a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		f. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional.	
		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.	
	2. Pembinaan	Pengelolaan arsip statis perangkat daerah kabupaten, badan usaha milik daerah kabupaten, perusahaan swasta dan perorangan berskala kabupaten.	
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.	
	4. Pengawasan/Supervisi		

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
1	2	3
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan kabupaten berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi : a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan dan peraturan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kabupaten sesuai kebijakan nasional.
		Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah kabupaten : a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional. 2. Koordinasi pelestarian tingkat daerah kabupaten.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional.	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala kabupaten sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	MILTON CROSBY

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

APIRAN X XVII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG KEHUTANAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
1	2	3
1. Inventarisasi Hutan		Penyelenggaraan inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skes DAS di area wilayah kabupaten.
2. Penunjukan Kawasan Hutan, Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru		Pengusulan penunjukan kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.
3. Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus		Pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat hukum adat, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala kabupaten dengan pertimbangan gubernur.
4. Pemanfaatan Kawasan Hutan		Pengusulan perubahan status dan fungsi hutan dan perubahan status dari lahan milik menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan.
5. Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		Pertimbangan penyusunan rancangan bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, serta institusi wilayah pengelolaan hutan.
6. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Unit Kesiitan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang unit KPHP.
7. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah (Lima Tahunan) Unit KPHP		Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah unit KPHP.

	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHP	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPHP.
	Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
		Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja lima tahunan unit pemanfaatan hutan produksi.
10.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi.
11.	Rencana Pengelolaan Tahunan (Jangka Pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pelaksanaan pengetaan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.
12.	Penataan Batas Luar Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi	Pertimbangan teknis untuk pengesahan, dan pengawasan pelaksanaan pengetaan batas luar areal kerja unit pemanfaatan hutan produksi dalam kabupaten.
13.	Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (jangka Panjang) Unit Kestuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL)	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHL
14.	Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (jangka Menengah) Unit KPHL	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL
15.	Rencana Pengelolaan Tahunan (jangka Pendek) Unit KPHL	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL
16.	Rencana Kerja Usaha Dua Puluh Tahunan Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	Pertimbangan teknis pengesahan rencana kerja usaha (dua puluh tahunan) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.

17. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (jangka menengah) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
18. Rencana Pengelolaan Tahunan (jangka pendek) Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung.
19. Penataan Areal Kerja Unit Usaha Pemanfaatan Hutan Lindung	Pertimbangan teknis pengesahan penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung kepada provinsi.
20. Rencana Pengelolaan Dua Puluh Tahunan (jangka panjang) Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit KPHK.
21. Rencana Pengelolaan Lima Tahunan (jangka menengah) Unit KPHK	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK.
22. Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (Tahunan) Unit KPHK	Pertimbangan teknis rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK.
23. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (Dua Puluh Tahunan) Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
24. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru	Pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.

25.	Rencana Pengelolaan Jangka Pendek Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru	Pertumbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru skala kabupaten.
26.	Pengelolaan Taman Hutan Raya	Pengelolaan taman hutan raya, penyusunan rencana pengelolaan dan penataan blok (zonasi) serta pemberian perizinan usaha pariwisata alam dan jasa lingkungan serta rehabilitasi di taman hutan raya skala kabupaten.
27.	Rencana Kehutanan	Penyusunan rencana kehutanan tingkat kabupaten.
28.	Sistem Informasi Kehutanan (Numerik dan Spasial)	Penyusunan sistem informasi kehutanan (numerik dan spasial) tingkat kabupaten/kota.
29.	Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi	Pertumbangan teknis kepada gubernur untuk pemberian dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu serta pemberian perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
30.	Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi	Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
31.	Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi	Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
32.	Industri Pengolahan Hasil Hutan	Pertumbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
33.	Penatausahaan Hasil Hutan	Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kabupaten.
34.	Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung	Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran <i>(Appendix) CITES</i> , dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani.
35.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan	Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kabupaten.

40.	Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove	1. Penetapan lahan kritis skala kabupaten. 2. Pertimbangan teknis rencana rehabilitasi hutan dan lahan taman hutan raya 3. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahanan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan skala kabupaten. 4. Penetapan rencana pengelolaan, rencana tahanan dan rancangan rehabilitasi hutan pada hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten.
41.	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
42.	Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Termasuk Hutan Mangrove	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
43.	Reklamasi Hutan pada Areal yang Dibebani Izin Penggunaan Kawasan Hutan	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
44.	Reklamasi Hutan Areal Bencana Alam	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
45.	Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan di Sekitar Hutan	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
46.	Pengembangan Hutan Hak dan Aneka Usaha Kehutanan	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
47.	Hutan Kota	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
48.	Perbenihan Tanaman Hutan	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.
49.	Pengusahaan Pariwata Alam pada Kawasan Pelestarian Alam, dan Pengusahaan Taman Buru, Areal Buru dan Kebun Buru	1. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan pemeliharaan hasil rehabilitasi hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani izin pemanfaatan/pengelolaan hutan, dan lahan di luar kawasan hutan skala kabupaten.	Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS skala kabupaten.

		Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran /Appendix/ CITES.
52. Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar		
53. lembaga Konservasi		Perimbangan teknis izin kegiatan lembaga konservasi (antara lain kebun binatang, taman safari) skala kabupaten.
54. Perlindungan Hutan		1. Pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi, hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta taman hutan raya skala kabupaten. 2. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan pada hutan yang dibebani hak dan hutan adat skala kabupaten..
55. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan		Penyelegaraan penelitian dan pengembangan kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan pemberian perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten.
57. Penyuluhan Kehutanan		Penguatan kelembagaan dan penyuluhan kehutanan skala kabupaten.
58. Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan		Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kabupaten.
59. Pengawasan Bidang Kehutanan		Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat, kinerja penyelenggara kabupaten dan penyelenggaraan oleh desa/masyarakat di bidang kehutanan.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
1	2	3
1. Mineral, Batu Bara, Panas Bumi, dan Air Tanah		
		1. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.
		2. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala kabupaten.
		3. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kabupaten.
		4. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin pengalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah pada wilayah kabupaten.
		5. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
		6. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
		7. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.
		8. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten.
		9. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten.
		10. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada wilayah kabupaten.
		11. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah kabupaten.
		12. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pascatambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap KP dalam wilayah kabupaten.
		13. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kabupaten.

	<p>14. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan mineral, dan batubara untuk operasi produksi, serta panas bumi yang berdampak lingkungan lingkungan dalam wilayah kabupaten.</p> <p>15. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kabupaten.</p> <p>16. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja pertambangan di wilayah kabupaten.</p> <p>17. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah kabupaten.</p> <p>18. Pengangkatan dan pembinaan inspektor tambang serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.</p> <p>19.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah kabupaten. 2. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 3. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah kabupaten. 4. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di wilayah kabupaten. 5. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi pada wilayah kabupaten. 6. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 7. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi, pada wilayah kabupaten. 8. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 9. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah kabupaten. 10. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional pada wilayah kabupaten. 11. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah kabupaten.
2. Geologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang energi dan ketenagalistrikan. 2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kabupaten. 3. Pemberian izin usaha ketenagalistrikan dalam kabupaten. 4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kabupaten. 5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. 6. Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten. 7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten. 8. Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/majoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 9. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kabupaten. 10. Penyediaan listrik pedesaan di wilayah kabupaten. 11. Pengangkatan dan pembinaan inspektor ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
3. Ketenagalistrikan		

4. Minyak dan Gas Bumi	1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghitungan produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah. 2. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kabupaten/kota. 3. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
	2. Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten. 2. Bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kabupaten. 3. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kabupaten. 4. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas. 5. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
	3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 2. Pengangkutan dan pembinaan inspektor migas serta pembinaan jabatan fungsional kabupaten.
	5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<p>Pengertian produksi dan realisasi <i>lifting</i> minyak bumi dan gas bumi bersama pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan <i>assessment</i> bekerjasama dengan lembaga <i>assessment</i> DESUM. 2. Penyusunan kebutuhan dan penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional tertentu sektor energi dan sumber daya mineral dalam skala kabupaten.

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERAIRAN SUNGAI, DANAU DAN PERIKANAN

NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

**URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERAIRAN SUNGAI, DANAU DAN PERIKANAN**

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	3
1	2	1
1. Perairan Sungai dan Danau.		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya ikan di wilayah perairan sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>2. Pelaksanaan penataan perairan sungai dan danau sesuai dengan peta potensi sungai dan danau di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah perairan sungai dan danau termasuk sumberdaya alam di wilayah sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemantauan sumberdaya sungai dan danau di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perairan sungai dan danau.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pantai sungai dan danau di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimisasi pemanfaatan sumberdaya perairan sungai dan danau di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan sungai dan danau di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang perairan sungai dan danau serta perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pantai sungai dan danau dalam kewenangan kabupaten.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan sungai dan danau secara terpadu.</p> <p>14. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya air di wilayah perairan sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>15. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya air kewenangan kabupaten.</p> <p>16. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah perairan sungai dan danau di dalam kewenangan kabupaten.</p> <p>17. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p>

1	2	3
<p>18. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan penerapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>20. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>21. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pantai di wilayah sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>22. Pengelolaan jasa perairan di wilayah sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>23. Pengelolaan dan konservasi plasma nutrisi spesifik lokasi di wilayah sungai dan danau kewenangan kabupaten.</p> <p>24. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan ketrayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten.</p> <p>25. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>27. Perencanaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian tata ruang sungai wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>28. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten.</p> <p>29. Rehabilitasi kawasan pantai sungai dan danau yang mengalami kerusakan.</p>	<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten.</p> <p>3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten.</p> <p>4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten.</p> <p>6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten.</p> <p>7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten.</p> <p>9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah perairan sungai dan danau.</p> <p>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya air dan perikanan di wilayah perairan sungai dan danau kabupaten.</p> <p>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>	

1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah perairan sungai dan danau kewenangan kabupaten.

2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan sungai dan danau kewenangan kabupaten.
3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutrisi sumberdaya ikan

kewenangan kabupaten.

4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebutan ikan di perairan sungai dan danau kewenangan kabupaten.

5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.

6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kabupaten.

7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten.

8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil/tradisional.

9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten.

10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten.

11. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan perabuhan perikanan kewenangan kabupaten.

12. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan perabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.

14. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.

15. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.

16. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.

17. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.

18. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkap ikan.

19. Pelaksanaan kebijakan pemerkasaan fisik kapal perikanan berukuran berukuran sampai dengan 10 GT.

20. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten.

21. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten.

22. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkap ikan.

4. Perikanan Budidaya

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan pelikatan di air tawar dan air payau. 3. pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penggunaan obat ikan, benih kimia, teknologi dan pakan ikan. 5. pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan serta pengawasan obat ikan, benih kimia, teknologi dan pakan ikan. 6. pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 7. pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan. 8. pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan. 9. pelaksanaan kebijakan rekommendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan. 10. pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan. 11. pelaksanaan teknis perbanyakkan dan pengelolaan induk penjensis, induk dasar dan benih alami. 12. pelaksanaan teknis perbanyakkan dan pengelolaan TUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menguntungkan. 13. pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan TUP di wilayah kabupaten. 14. pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan. 15. pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya. 16. pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkat, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan perlindungan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya. 17. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wadah dan wilayah wabah penyakit ikan. 18. pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten. 19. pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi. 20. pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan. 21. pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan. 22. pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah sungai dan danau kabupaten.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan pemakaian dan perlindungan plasma nutrisi perikanan. 2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan. 3. pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan. 4. Pengawasan mutu benih dan induk ikan, obat dan benih sekunder. 5. Pengawasan PMI atau HACCP di unit pengolahan, unit transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan. 6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan. 7. pengawasan pemakaian dan perlindungan sumsum ikan merah sunari dan dianu di kabupaten. 8. Pengawasan pemakaian sumsum ikan merah sunari dan dianu di kabupaten.

III. Pengolahan dan Pemasaran

Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran.

1. pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.

2. pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, elai transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan basah
prinsip PMW atau HACCP.

3. pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotic, dan zonasi mikroba dan teknik bersehati dan
serta peralihan lingkungan tempat ikan hidup.

4. pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.

5. pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten.

IV. Penyuluhan dan Pendidikan

Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasaran.

1. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan diklat fungisional, teknis, keahlian, manajemen dan
kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten.

2. pelaksanaan penyuluhan perairan sungai, danau dan perikanan di kabupaten.

3. pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat biologi sungai, danau dan perikanan di kabupaten.

SUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY

NOMOR : 1 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 JULI 2008
TENTANG : URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN PELUHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
BIDANG PERDAGANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN KOTA
1	2	3
Perdagangan Dalam Negeri	1. Perdenganan izin usaha perdagangan di wilayah kabupaten. 2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin pendataran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kabupaten. 3. Pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SkuP Minuman Beralkohol gelengen B dan C untuk Pengecer. Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengancang diminum di tempat. Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengancang diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengancang Rempah sampai dengan 15%. Rekomendasi Skup Bahari Berbahaya. Rekomendasi Pengakuhan Pedagang Kayu antar Kabupaten(Kota). 4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kabupaten. 5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan percegongan di daerah perdesaan, pedalaman, terpencil di kabupaten. 6. Pembinaan dan pengawasan, pemeringan S&E dengan rekomendasi skala terentu, monitoring dan evaluasi setrena perdagangan (pasar) loko modern dan jadid yang ada di sekitar penunjung percegongan (jasa pameran, konvensi, dan seminar) diagenggri skala lokal. 7. Penyejenggeraan, pembinaan dan pengawasannya, monitoring dan evaluasi kegiatan pasar dan stabilisasi harga di kabupaten. 8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kabupaten.	Q. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kabupaten: 1) Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen. 2) Pelajaran dan peningkatan perlindungan konsumen di kabupaten. 3) Pemberdayaan Konsumen di kabupaten. 4) Peningkatan dan Pemberdayaan Konsumen di kabupaten. 5) Pengusulan pembentukan BPK di kabupaten.

1	2	3	<p>16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan, perizinan, surjuk pelaksanaan perijuk teknis pengawasan barang besar dan jasa.</p> <p>18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kabupaten.</p> <p>19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.</p> <p>20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kabupaten.</p> <p>21. Pembinaan dan pembardayaan PPBS skala kabupaten.</p> <p>22. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten.</p> <p>23. Penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendafutan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika swasta kabupaten.</p> <p>24. Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skala kabupaten/kota.</p> <p>25. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Metrologi legal</p> <p>1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pengetahuan yang didasarkan rekomendasi provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kabupaten.</p> <p>3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.</p> <p>4. Pelayanan tera dan tera ulang UUTP setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi oleh pemerintah.</p> <p>5. Fasilitasi penyelenggaraan kajian/muatan metrologi legal skala kabupaten.</p> <p>6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UUTP, BDKT dan SI.</p> <p>7. Pembinaan operasional reparatur UUTP.</p> <p>8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUPL.</p> <p>3. Perdagangan Luar Negeri</p> <p>1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.</p> <p>4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.</p> <p>5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ditinjau dari:</p> <p>6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten/kota.</p> <p>7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang yang diperlukan yang ditinjau dari:</p> <p>oleh PPC yang terregister dan Pengujian, Inspeksi teknis dan sertifikasi yang terregister dan terdaftar.</p>
---	---	---	--

8. Penilaian dan pelaporan angka kredit PnB tingkat kabupaten/kota.

9. Penyedaean bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA dan penelusuran aset barang.

10. Sosialisasi penerbitan penerbitan SKA penelusuran aset barang di tingkat kabupaten/kota yang ditutup.

11. Penyediacan bahan masukan untuk penelitian APB.

12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan APB.

13. Penyediacan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi peleaksanæen monitoring dan petunjuk, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

14. Penyediacan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam sidang komoditi internasional.

15. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.

1. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

2. Monitoring dan sosialisasi hasil kesepakatan kerjasama perdagangan internasional.

3. Monitoring dan sosialisasi hasil-hasil kesepakatan kerjasama perdagangan bilateral.

4. Monitoring dan sosialisasi *dumping*, subsidi, dan *safeguard*.

1. Penyeðiaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.

2. pelaksanaan negatian pengembangan ekspor skala kabupaten/kota.

1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang terjadi dengan ketegangan berjangka komoditi.

2. Pembinaan komodites dalam rangka memperoleh akses pembayaan resi guichang.

3. Pembinaan, pengawasan dan pengelenggaraan dan pelatihan teknis terhadap teknis yang bersifat teknis terhadap teknis yang bersifat teknis.

4. Kesiama Perdagangan Internasional

5. Pengembangan Ekspor Nasional

6. Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem Resi Gudang, Pasar lelang

LAMPIRAN XXXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2008
 TANGGAL : 31 JULI 2008
 TENTANG : URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG

URUSAN PILIHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
 BIDANG PERINDUSTRIAN

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA		
SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	
1	2	3
1. Perizinan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan londa daftar industri dan IUI skala investasi s/d Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi. 3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten.
2. Usaha Industri		Penetapan bidang usaha industri prioritas kabupaten.
3. Fasilitas Usaha Industri		Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kabupaten.
4. Perlindungan Usaha Industri		Pemberian perlindungan kepentingan berusaha terhadap usaha industri di kabupaten.
5. Perencanaan dan Program		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri kabupaten. 2. Penyusunan RPJM SKPD kabupaten/kota di bidang industri. 3. Penyusunan rencana kerja kabupaten/kota di bidang industri.
6. Pemasaran		Promosi produk industri kabupaten.
7. Teknologi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kabupaten. 2. Fasilitasi pemantauan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri. 3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
8. Standarisasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akur dikembangkan di kabupaten. 2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kabupaten.

Sumber Daya
Kawasan (SDK)

O. pertimbangan:

1. Lingkungan Hidup

12. Kerjasama Industri

13. Keterbukaan

14. Sarana dan Prasarana

15. Informasi Industri

1. Penerapan standar kompetensi SDN industri dan aparat pembina industri di kabupaten.
2. Pelaksanaan dirlet SDN industri dan aparat pembina industri di kabupaten.

Fasilitas dan permodalan bagi industri tingkat kabupaten bukan bank di kabupaten tidak.

1. Pembinaan industri dalam rangka pencetakan lingkungan yang diakibatkan oleh lingkatan tingkat kabupaten.
2. Pengawasan terhadap pencetakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kabupaten.

1. Fasilitasi kerjasama antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kabupaten/kota.
2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kermitraan usaha di kabupaten/kota.

1. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kabupaten/kota.
2. Pengembangan asosiasi industri/dewan tingkat kabupaten.

1. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kabupaten.
2. Pengembangan dan pelaksanaan teknologi yang terintegrasi serta koordinasi penyejalan penyusunan tata ruang kabupaten/kota dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi), selaras dengan prasarananya (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKN) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).

Pengumpulan, analisis dan disseminasi data bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada provinsi,

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kesenilarisan bidang industri tingkat kabupaten.

16. Pengawasan Industri

17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten.

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY